

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG HASIL  
EVALUASI JABATAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil validasi evaluasi jabatan berupa nilai jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, perlu menetapkan kelas jabatan untuk jabatan fungsional Analis Kebijakan Pertama dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Menimbang :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
  3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal 1

Mengubah Lampiran II Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.



LAMPIRAN  
 PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
 BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 2 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN  
 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
 PEMERINTAH

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1~9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1~5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1~5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1~6)	FAKTOR 5 R. Lingkup & Pengaruh (Level 1~5)	FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1~5)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)	FAKTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1~3)
1	PENGEMUDI (SMA)	3	370	2 200	1 25	1 25	1 25	1 25	1 10	1 20	2 20	2 20
2	ARSIPARIS PELAKSANA (D3)	6	755	4 550	1 25	1 25	2 75	1 25	2 25	1 20	1 5	1 5
3	ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN (D3)	7	855	4 550	2 125	1 25	2 75	1 25	2 25	1 20	1 5	1 5
4	PENGADMINISTRASI UMUM (D3)	6	755	4 550	1 25	1 25	2 75	1 25	2 25	1 20	1 5	1 5

5	PENGADMINISTRASI PERLENGKAPAN (D3)	6	755	4	550	1	25	1	25	1	75	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
6	PENGADMINISTRASI SERTIFIKASI (D3)	6	740	4	550	1	25	1	25	1	75	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
7	PENGELOLA (D3)	6	755	4	550	1	25	1	25	1	75	1	25	2	25	2	25	1	20	1	5	1	5
8	PENGOLAH DATA (D3)	6	755	4	550	1	25	1	25	1	75	1	25	2	25	2	25	1	20	1	5	1	5
9	VERIFIKATOR KEUANGAN (D3)	6	740	4	550	1	25	1	25	1	75	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
10	PENYUSUN BAHAN (S1)	7	1035	5	750	1	25	1	25	2	75	2	75	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
11	PENYUSUN LAPORAN BMN (S1)	7	1035	5	750	1	25	1	25	2	75	2	75	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
12	PENATA KEUANGAN (S1)	7	1035	5	750	1	25	1	25	2	75	2	75	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
13	PERENCANA PERTAMA (S1)	8	1110	5	750	1	25	1	25	3	150	2	75	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
14	PERENCANA MUDA (S1)	9	1460	5	750	3	275	2	125	2	75	3	150	2	25	2	25	2	50	1	5	1	5
15	PERANCANG PERATURAN PER-UU PERTAMA (S1)	8	1145	5	750	1	25	1	25	3	150	2	75	3	60	2	60	2	50	1	5	1	5
16	PERANCANG PERATURAN PER-UU MUDA(S1)	9	1495	5	750	3	275	2	125	3	150	2	75	3	60	2	60	2	50	1	5	1	5
17	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA (S1)	8	1110	5	750	1	25	1	25	3	150	2	75	2	25	2	25	2	50	1	5	1	5
18	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA (S1/S2)	9	1460	5	750	2	275	2	125	2	75	3	150	2	25	2	25	2	50	1	5	1	5
19	PRANATA HUMAS PERTAMA (S1)	8	1145	5	750	1	25	1	25	3	150	2	75	3	60	2	60	2	50	1	5	1	5
20	PUSTAKAWAN PERTAMA (S1)	8	1145	5	750	1	25	1	25	3	150	2	75	3	60	2	60	2	50	1	5	1	5



21	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA (D3)	6	790	4	550	1	25	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
22	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN (D3)	7	890	4	550	2	125	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
23	PRANATA KOMPUTER PENYELIA (D3)	8	1205	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
24	PRANATA KOMPUTER PERTAMA (S1)	8	1195	5	750	2	125	1	25	3	150	2	75	1	10	2	50	1	5	1	5
25	PRANATA KOMPUTER MUDA (S1/S2)	9	1460	5	750	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
26	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA (S1)	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
27	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA (S1)	8	1105	5	750	2	125	1	25	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA.

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 603